

## **Peran Pemerintah Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Dalam Pembangunan Lokal: Menghadapi Tantangan Masa Kini**

**Margaret Pangaribuan<sup>1</sup> Riomas Meliana<sup>2</sup> Tasya Marbun<sup>3</sup> Widya Purba<sup>4</sup> Halking<sup>5</sup>**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [margaretpangaribuan1@gmail.com](mailto:margaretpangaribuan1@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran pemerintah Desa Marindal 1 dalam pembangunan lokal, khususnya dalam menghadapi tantangan masa kini. Dengan mengumpulkan data dari perangkat desa serta masyarakat setempat, penelitian ini akan memberi gambaran lengkap terkait strategi, hambatan, serta peluang dalam membangun komunitas yang berdaya saing dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Desa Kecamatan Patumbak dalam Pembangunan Daerah

### **Abstract**

*This research aims to dig deeper into the role of the Marindal 1 Village government in local development, especially in facing current challenges. By collecting data from village officials and local communities, this research will provide a complete picture of strategies, obstacles and opportunities in building competitive and sustainable communities.*

**Keywords:** Government, Patumbak District in Local Development



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa adalah lembaga yang mewakili pemerintah pusat dan memiliki peran penting dalam pengelolaan masyarakat desa atau kelurahan serta dalam keberhasilan pembangunan nasional (Rafsanjani, et.al., 2010). Pemerintah desa memainkan peran yang krusial dalam mengelola proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utamanya adalah menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan layanan sosial yang memadai, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera, merasa aman, dan memperoleh keadilan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah desa dituntut melakukan perubahan yang signifikan, baik dalam hal kepemimpinan maupun kinerja birokrasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat desa. Dengan demikian, praktik pemerintah desa semakin mendekati prinsip good governance dan menghindari praktik bad governance (Dwipayana dan Eko, 2003). Pembangunan pedesaan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pembangunan desa saat ini dipahami sebagai upaya untuk mencapai kemandirian kelompok masyarakat. Hal ini tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014, Bab IV Pasal 18 yang menyatakan bahwa kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014, 2014). Pembangunan yang mengacu pada potensi serta sumber daya lokal diharapkan dapat menjadi ciri khas bagi masing-masing desa, karena potensi unggulan setiap desa bisa berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya keunikan setiap desa, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun geografis (Ulfah et al., 2017). Kemandirian masyarakat dianggap sebagai hasil dari sikap

kolektif masyarakat dalam mendorong perubahan sosial. Perubahan perilaku ini bisa didukung melalui program intervensi pemerintah yang mendorong partisipasi masyarakat, atau bisa juga tumbuh dari inisiatif dan kreativitas masyarakat itu sendiri. Potensi generasi muda di desa pun dapat dimaksimalkan dengan menciptakan peluang kewirausahaan yang sesuai dengan minat pemuda serta potensi daerah setempat.

Beragam pendekatan pembangunan telah diterapkan, mulai dari pendekatan berbasis pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pendekatan terbaru yaitu pemberdayaan masyarakat yang menempatkan mereka sebagai pusat (baik sebagai objek maupun subjek) pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang ada lebih banyak berfokus pada aspek fisik daripada pengembangan karakter masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang tepat adalah yang memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri, terdesentralisasi, dan tepat sasaran. Konsep pembangunan yang berfokus pada manusia memandang inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya utama pembangunan dan menempatkan kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan utama. Visi ini menjadikan pembangunan sebagai gerakan masyarakat, bukan sekadar proyek pemerintah. Pendekatan ini sangat relevan karena adanya pergeseran peran pemerintah dalam pembangunan, yang pada dasarnya dijalankan oleh masyarakat. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatannya, peran masyarakat sangat penting. Peran tersebut akan lebih efektif jika masyarakat juga turut serta dalam pengelolaan alokasi anggaran.

Pembangunan seharusnya menjadi sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Tidak hanya untuk beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga untuk mengarahkan perubahan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Tujuan pembangunan adalah untuk mengembangkan berbagai sektor di setiap daerah atau wilayah di Indonesia, dengan kata lain, pembangunan diharapkan dapat mendorong munculnya inovasi yang bermanfaat bagi negara. Manfaat dari inovasi dalam pembangunan desa meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mutu daerah, sehingga Indonesia memiliki potensi yang terus dapat dikembangkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan di Desa Marindal 1. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa, serta pengamatan langsung dan analisis dokumen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data mendalam dan kontekstual mengenai peran pemerintah Desa Marindal 1 dalam pembangunan lokal.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah Desa Marindal 1 dalam Pembangunan Lokal**

Pengembangan Ekonomi Desa Pemerintah Desa Marindal 1 berperan aktif dalam mendukung sektor ekonomi lokal, termasuk pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi pertanian, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat ekonomi desa. Lewat BUMDes, desa dapat mengelola kegiatan usaha seperti perdagangan produk pertanian, kerajinan tangan, dan jasa lain yang dibutuhkan warga. Pembangunan Infrastruktur Pemerintah desa berperan dalam membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi untuk memfasilitasi mobilitas warga dan mendukung kegiatan ekonomi. Dana desa digunakan untuk memperbaiki jalan rusak dan membangun fasilitas publik.

### **Pelayanan Sosial dan Kesehatan**

Pemerintah Desa Marindal 1 menyediakan layanan sosial seperti kesehatan bagi ibu dan anak, posyandu, serta bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu. Kerja sama dengan puskesmas juga dilakukan untuk mengadakan penyuluhan kesehatan dan layanan lainnya yang mendukung kesejahteraan warga.

### **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Tantangan lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan kualitas air, diatasi melalui edukasi masyarakat dan kegiatan gotong royong. Pemerintah desa juga memfasilitasi penghijauan sebagai bagian dari program pelestarian lingkungan.

### **Tata Kelola Transparan dan Akuntabel**

Pemerintah Desa Marindal 1 berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Musyawarah desa rutin dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan mereka.

### **Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Desa Marindal 1**

Pengembangan infrastruktur dan inovasi desa tentu menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pembangunan desa. Meski begitu, kendala-kendala ini sebenarnya dapat mendorong peningkatan kualitas pengembangan desa, karena setiap tantangan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam menciptakan inovasi untuk mewujudkan pembangunan desa bagi masyarakat. Beberapa tantangan dalam pembangunan desa termasuk adanya warga yang tidak setuju, dilema dalam pemanfaatan sumber daya alam desa, dan lain sebagainya. Pada tahun 2020, pengembangan desa mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19, yang mengalihkan anggaran pembangunan untuk penanggulangan pandemi. Tantangan lain dalam program inovasi desa adalah fokus yang masih dominan pada pembangunan infrastruktur. keterbatasan infrastruktur. beberapa wilayah desa yang terpencil masih mengalami keterbatasan infrastruktur, yang menghambat pemerataan pembangunan. Pemerintah desa bekerja secara bertahap untuk mengatasi kendala ini.

Meskipun kebutuhan infrastruktur tetap tinggi dan dipandang dapat membuka lapangan kerja, ke depan diperlukan keseimbangan antara pembangunan fisik dan nonfisik (Henriyani, 2019). Tantangan dalam pembangunan desa tidak bisa dihindari, karena pembangunan desa adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga permasalahan yang ada selalu berkaitan dengan kedua pihak. Meski demikian, tantangan ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap masalah yang mungkin muncul dan menjadi pelajaran bagi para aktor pembangunan desa untuk mengurangi risiko terjadinya hambatan. selain itu juga Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan. masih ada sebagian masyarakat Desa Marindal 1 yang dalam kondisi ekonomi kurang sejahtera, yang memerlukan perhatian pemerintah desa agar mereka dapat merasakan manfaat pembangunan. selain itu juga Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi. Keterbatasan tenaga ahli dan penggunaan teknologi menghambat efektivitas pengelolaan administrasi dan layanan publik. Pelatihan dan bantuan teknologi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Serta kurangnya partisipasi masyarakat. partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih belum merata. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam menjalankan program yang membutuhkan keterlibatan aktif warga.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan Desa Marindal 1**

1. Faktor Pendukung. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah melalui dana desa, peran tokoh masyarakat, serta keberadaan BUMDes mendukung keberhasilan pembangunan Desa Marindal 1.

2. Faktor Penghambat. Keterbatasan anggaran untuk sektor tertentu, kurangnya keterampilan aparatur desa dalam penggunaan teknologi, dan birokrasi yang kompleks menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

### **Pengembangan Ekonomi Lokal**

Salah satu peran utama pemerintah desa dalam pembangunan lokal adalah memajukan ekonomi di wilayahnya. Dengan adanya otonomi dan kemandirian desa, pemerintah desa memiliki peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa langkah penting dalam pengembangan ekonomi lokal adalah: Pengembangan UMKM dan Usaha Desa. Pemerintah desa dapat mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). UMKM dan BUMDes memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian desa. BUMDes misalnya, dapat bergerak di berbagai sektor, seperti perdagangan, pengelolaan pariwisata, pertanian, atau jasa keuangan mikro. Pelatihan Keterampilan dan Akses Modal Untuk mendukung usaha lokal, pemerintah desa juga berperan dalam menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan bagi masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di desa. Selain itu, pemerintah desa dapat memfasilitasi akses ke permodalan, baik melalui BUMDes maupun dengan menghubungkan warga dengan lembaga keuangan atau program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Promosi dan Pemasaran Produk Lokal. Agar produk lokal desa lebih dikenal, pemerintah desa dapat membantu dalam hal promosi dan pemasaran, termasuk memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Produk lokal desa, seperti kerajinan tangan, makanan khas, atau hasil pertanian organik, memiliki potensi untuk dipasarkan lebih luas dengan dukungan promosi yang tepat.

### **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparansi**

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan lokal adalah menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa dan sumber daya lainnya digunakan secara efektif. Berikut adalah peran pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang baik: Transparansi Anggaran dan Keterbukaan Informasi. Pemerintah desa harus transparan dalam hal anggaran dan penggunaan dana desa. Keterbukaan ini mencakup penyampaian informasi mengenai perencanaan dan pengelolaan anggaran desa kepada masyarakat, misalnya melalui papan informasi desa atau media sosial resmi desa. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa harus mengajak masyarakat terlibat dalam musyawarah desa dan memberikan masukan terkait program pembangunan. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. Aparatur desa perlu dilatih dan dibekali keterampilan agar mampu menjalankan pemerintahan yang efisien. Pelatihan dalam hal administrasi, keuangan, serta keterampilan digital sangat penting untuk mendukung pengelolaan pemerintahan desa yang lebih modern.

### **KESIMPULAN**

Pemerintah Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak berperan penting dalam pembangunan lokal melalui pengembangan ekonomi, penyediaan infrastruktur, pelayanan sosial, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan ekonomi, dan partisipasi masyarakat yang rendah masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program

pembangunan. Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa meningkatkan perannya dalam pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi warga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfiana, A., Mulatsih, L. S., Kakaly, S., Rais, R., Husnita, L., & Asfahani, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Edukasi Digital Di Era Teknologi. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7113-7120.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds). *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Fitriyanti, A., Indriani, E., & Suryantara, A. B. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43-59.
- Lutfiyah, L. (2013). Pemberdayaan Wanita Berbasis Potensi Unggulan Lokal. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 213-224.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Putra, R. R., Hadiwijaya, H., & Kurniawan, D. (2022). Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa. Penerbit Nem.
- Mesa, J. B. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5), 625-635.
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Umar, I., M Yuardani, A., & Rinaldi, H. (2016). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum